

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

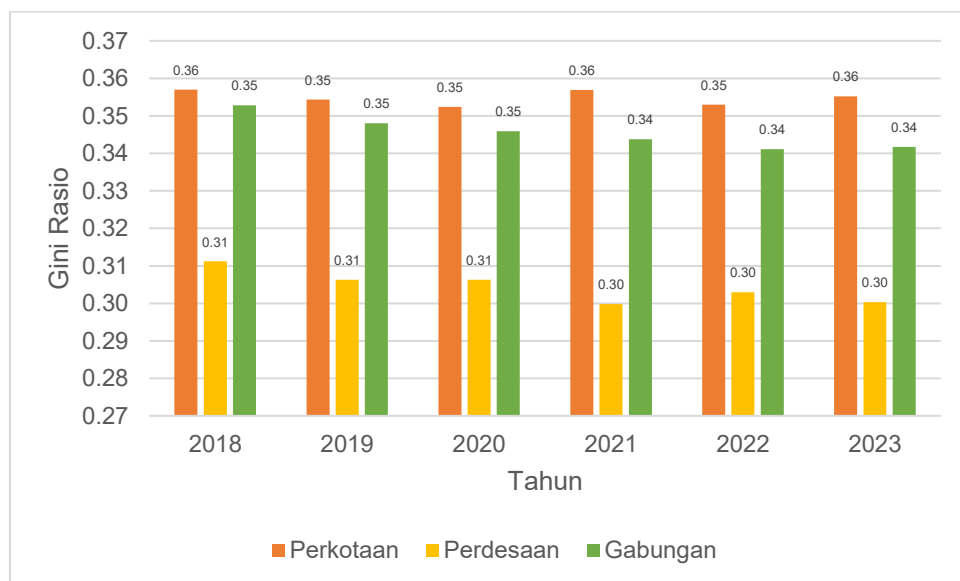
Ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan perekonomian yang berdampak sistemik pada negara, seperti menurunkan daya beli masyarakat miskin, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi mobilitas sosial. Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa ketimpangan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, mengganggu investasi, dan menurunkan produktivitas. Pengurangan ketimpangan merupakan tujuan ke-10 dalam SDGs, yang menunjukkan pentingnya isu ini, terutama di negara berkembang (Sari & Falianty, 2021). Termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi seharusnya dibarengi dengan distribusi pendapatan yang merata. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi bersamaan dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi, pertumbuhan tersebut kehilangan signifikansinya, karena manfaatnya tidak dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Agusalim & Setiawan, 2025).

Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan ketimpangan pendapatan melalui penguatan sektor sosial dan ekonomi inklusif, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan rasio gini ke kisaran 0,372–0,375 untuk mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan, menjamin pemerataan yang lebih adil di seluruh wilayah Indonesia (Badan Kebijakan Fiskal, 2025). Namun, selama tahun 2018–2023, rasio gini Indonesia stagnan di kisaran 0,34–0,35. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan pemerataan pendapatan masih menjadi tantangan.

Vanheuvelen (2018) mengacu pada teori Simon Kuznets dan penelitian lainnya untuk menyarankan bahwa daerah perkotaan harus mengalami tingkat ketimpangan yang lebih tinggi daripada tempat-tempat perdesaan. Mereka berpendapat bahwa tempat-tempat pertama kemungkinan besar dicirikan oleh ekonomi yang dinamis, pasokan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, dan karakteristik lain yang terkait pekerjaan bergaji tinggi yang menyebabkan distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Untuk daerah perdesaan, implikasinya adalah ketimpangan relatif lebih rendah karena pendapatan masyarakat cenderung homogen.

Kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan kian menjadi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Urbanisasi yang tidak merata menyebabkan masyarakat di wilayah perkotaan semakin terakumulasi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Peluang berpindahnya penduduk desa ke kota juga semakin lebar jika terjadi kesenjangan upah minimum provinsi (UMP) yang semakin lebar. Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia menunjukkan tenaga kerja akan bermigrasi ke wilayah dengan UMP yang lebih tinggi. Kondisi ini terjadi lantaran adanya ketimpangan upah antarprovinsi yang selama ini terjadi (Tempo.co, 2025).

Tingkat ketimpangan perdesaan dan perkotaan juga dapat dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi suatu wilayah. Ilmuwan sosial semakin menyadari bahwa letak geografis memiliki implikasi bagi pembangunan ekonomi (Brown, 2019). Ketimpangan pendapatan perdesaan dan perkotaan sangat terkait dengan koefisien Gini (J. Cheng & Lin, 2022). Nilai yang mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang besar (Martin & Conway, 2025).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1. 1 Rata-rata Rasio Gini 2018-2023

Terlihat pada Gambar 1.1, rasio gini Indonesia dalam periode 2018–2023 cenderung stagnan pada kisaran 0,34–0,35. Ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, dengan rata-rata sebesar 0,36 di perkotaan dan 0,31 di perdesaan. Selama enam tahun terakhir, tidak terdapat tren penurunan yang signifikan, yang mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif atau merata di seluruh segmen masyarakat. Ketimpangan yang lebih tinggi di wilayah perkotaan juga menunjukkan bahwa akses terhadap kesempatan ekonomi dan distribusi hasil pembangunan masih belum merata antarwilayah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih komprehensif untuk menjembatani kesenjangan antar kelompok pendapatan, salah satunya melalui peningkatan inklusi keuangan.

Data dari Badan Pusat Statistik (2025) memperkuat argumen tersebut. Selama periode 2018–2023, rata-rata pengeluaran 40 persen kelompok penduduk terbawah di wilayah perkotaan secara konsisten lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang sama di wilayah perdesaan. Hal ini menandakan bahwa

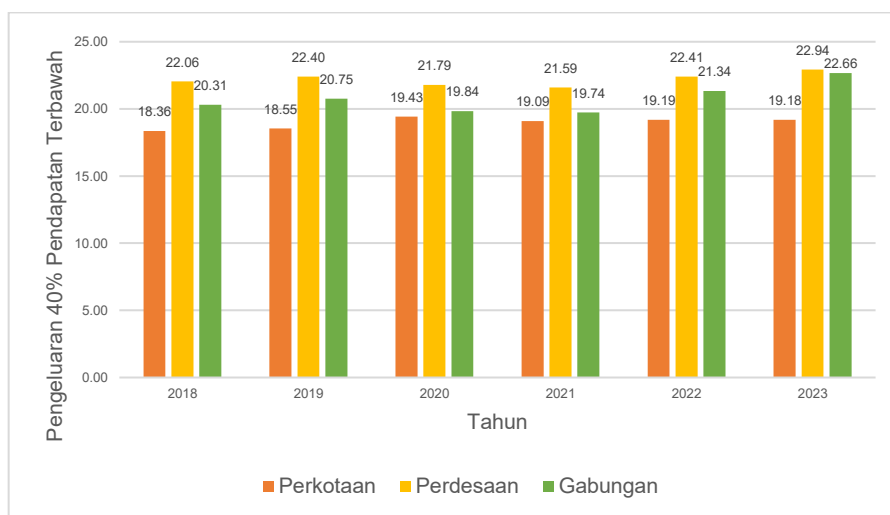
kelompok miskin di perkotaan menghadapi kondisi ekonomi yang lebih rentan. Keterbatasan akses terhadap lahan, tingginya biaya hidup, serta tingginya ketimpangan pendapatan akibat konsentrasi aktivitas ekonomi di sektor formal, membuat masyarakat miskin kota semakin terpinggirkan. Sebaliknya, meskipun masyarakat perdesaan juga menghadapi berbagai keterbatasan, struktur biaya hidup dan pola konsumsi yang berbeda menjadikan kondisi mereka relatif lebih stabil.

Hal ini didukung oleh penelitian Alves et al (2022) yang menggunakan indikator *income share* 40 persen penduduk terbawah untuk mengukur ketimpangan pendapatan, dengan alasan bahwa indikator ini mampu menangkap perubahan distribusi pendapatan secara lebih spesifik pada kelompok berpendapatan rendah. Pendekatan ini dinilai lebih sensitif dalam merepresentasikan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan, terutama dalam konteks pengujian kurva Kuznets yang menekankan dinamika ketimpangan pada fase awal dan lanjutan pembangunan ekonomi.

Meskipun berbagai studi telah mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, sebagian besar masih menggunakan rasio Gini sebagai indikator utama, tanpa mempertimbangkan dinamika kelompok masyarakat bawah secara lebih spesifik. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara terpisah membedakan analisis wilayah perdesaan dan perkotaan, padahal keduanya memiliki struktur sosial-ekonomi yang sangat berbeda. Celah inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Gambar 1.2 di bawah menunjukkan perkembangan rata-rata pengeluaran 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah di Indonesia menurut wilayah perdesaan, perkotaan, dan gabungan pada periode 2018 hingga

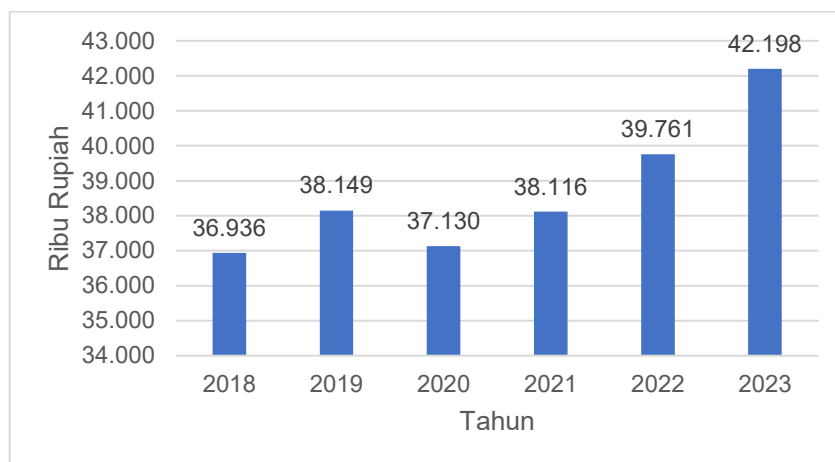
2023. Selama periode tersebut, kelompok 40 persen terbawah di wilayah perkotaan secara konsisten mencatat rata-rata pengeluaran paling rendah, yaitu berkisar antara 18,2 persen hingga 19,3 persen, sedangkan kelompok perdesaan berada pada kisaran 21,7 persen hingga 23,0 persen, dan kelompok gabungan perdesaan dan perkotaan berada di antara keduanya, yakni sekitar 20,0 persen hingga 22,8 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di wilayah perkotaan mengalami kondisi ekonomi yang lebih rentan dibandingkan dengan wilayah perdesaan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 1. 2 Rata-rata Pengeluaran 40 Persen Penduduk Terbawah di Wilayah Perkotaan, Perdesaan, dan Gabungan Tahun 2018–2023

Telah banyak penelitian yang mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan insiden ketimpangan pendapatan. Menurut Badan Pusat Statistik, (2024) Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang umum digunakan adalah PDRB Per kapita. Yulikasari dan Samsuddin (2025) menemukan bahwa di Indonesia pertumbuhan PDRB per kapita yang diarahkan ke sektor produktif seperti pertanian modern, industri padat karya, dan ekonomi digital inklusif, secara signifikan menurunkan ketimpangan wilayah.



Sumber: (Badan Pusat Statistika, 2025)

Gambar 1. 3 Rata-rata PDRB Perkapita Tahun 2018-2023

Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan rata-rata PDRB Perkapita di Indonesia selama periode 2018 hingga 2023. Secara umum, terlihat adanya tren kenaikan yang signifikan, terutama setelah tahun 2021. Pada tahun 2018, rata-rata PDRB Perkapita tercatat sekitar 37,13 ribu rupiah, dan meningkat secara bertahap hingga mencapai lebih dari 42,19 ribu rupiah pada tahun 2023. peningkatan PDRB Perkapita tidak serta-merta menurunkan ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pendapatan agregat meningkat, distribusinya masih belum merata. penting untuk menganalisis lebih lanjut apakah pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan PDRB Perkapita ini memberikan efek yang sama terhadap kelompok masyarakat miskin di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Dalam konteks ini, teori Kuznets menjadi salah satu pendekatan konseptual yang relevan untuk menganalisis dinamika antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Simon Kuznets (1955) dalam hipotesisnya mengemukakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan bersifat non-linear. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan

meningkat karena hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul akibat transformasi struktural, seperti migrasi ke sektor industri dan urbanisasi. Namun, seiring berjalannya waktu, ketimpangan akan mulai menurun. Hubungan ini membentuk pola kurva U terbalik (*inverted U-shaped curve*), yang menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada awalnya memperburuk ketimpangan, tetapi pada fase tertentu justru menjadi instrumen pemerataan.

Teori tersebut pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sirtama (2021) hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan membentuk U Terbalik yang memiliki arti bahwa pada masa awal pertumbuhan ekonomi diikuti dengan adanya ketimpangan pendapatan yang meningkat, terbukti dengan terus tumbuhnya pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2001 sampai Tahun 2010 akan tetapi diikuti dengan ketimpangan pendapatan yang meningkat. Kemudian, pada masa berikutnya yaitu pada Tahun 2011 sampai Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh akan tetapi diikuti dengan ketimpangan pendapatan yang menurun.

Permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan membutuhkan banyak upaya untuk menurunkannya. Akses terhadap layanan keuangan diakui secara global merupakan faktor utama bagi pembangunan ekonomi dan sosial dalam mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan agenda PBB 2030 mengenai pembangunan berkelanjutan, inklusi keuangan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

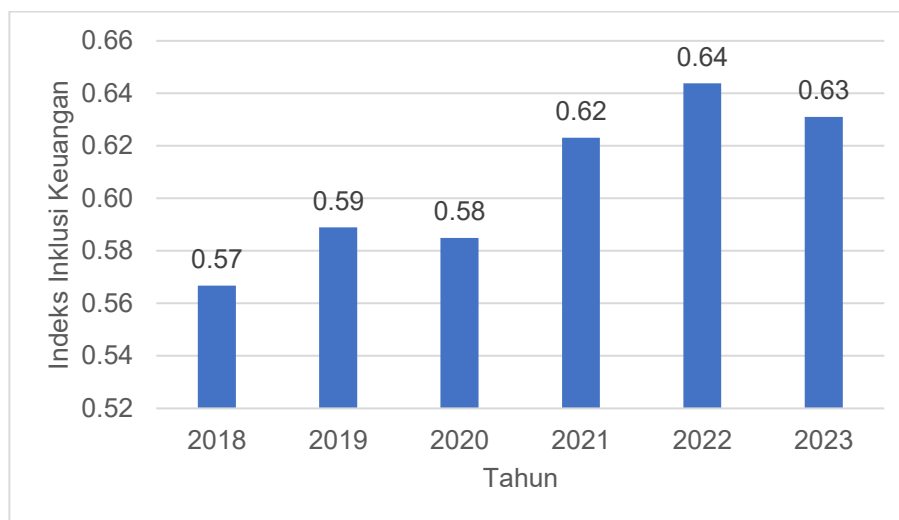
Inklusi keuangan merupakan kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang adil terhadap layanan keuangan formal seperti tabungan, kredit, asuransi, dan sistem pembayaran. Akses terhadap layanan keuangan

memungkinkan rumah tangga miskin untuk menabung, mengakses modal usaha, dan mengelola risiko. Segning *et al* (2024) menyatakan bahwa inklusi keuangan memainkan peran penting dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di negara-negara berkembang. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk inklusi keuangan baru, yakni inklusi keuangan digital. Layanan seperti mobile banking, dompet digital, dan fintech telah memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke wilayah terpencil.

Khera *et al* (2021) mengatakan bahwa bidang keuangan digital berkembang pesat dengan teknologi digital, dan ada potensi yang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan digital. Inklusi keuangan digital memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan keuangan digital dengan biaya yang lebih efisien jika dibandingkan dengan inklusi keuangan tradisional. Melihat potensinya. Untuk mengukur inklusi keuangan yang lebih komprehensif, peneliti menggabungkan proxy tradisional yang dikembangkan oleh Sarma (2008) dengan proxy digital yang dikembangkan oleh Khera *et al* (2021) sehingga menciptakan indeks inklusi keuangan yang lebih komprehensif dengan menggunakan perhitungan terbaru Principal Analysis Component (PCA) yang dikembangkan oleh Khera *et al* (2021).

Perkembangan rata-rata indeks inklusi keuangan di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023. Selama periode ini, indeks inklusi keuangan mengalami tren peningkatan yang cukup konsisten, dengan kenaikan paling signifikan terjadi antara tahun 2020 dan 2022, yaitu dari sekitar 0,59 menjadi 0,64. Meskipun pada tahun 2023 indeks sedikit menurun menjadi sekitar 0,63 secara umum tren inklusi keuangan menunjukkan kemajuan yang positif. Peningkatan indeks ini

mencerminkan membaiknya akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan di Indonesia, baik melalui tradisional seperti bank maupun melalui digital.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024, Otoritas Jasa Keuangan, 2024, Bank Indonesia, 2024

Gambar 1. 4 Rata-rata Indeks Inklusi Keuangan

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, inklusi keuangan digital berpotensi menjadi jembatan bagi kelompok miskin di wilayah terpencil untuk mengakses layanan keuangan formal. Hal ini sangat krusial, terutama di wilayah perdesaan yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur keuangan. Dengan demikian, peningkatan inklusi keuangan bukan hanya memperluas akses, tetapi juga menjadi strategi strategis dalam mengurangi ketimpangan pendapatan secara spasial. Hal ini di dukung oleh Judijanto (2025) menganalisis pengaruh inklusi keuangan digital terhadap ketimpangan pendapatan di negara-negara ASEAN. Dengan menggunakan estimasi panel statis, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan akses keuangan digital mampu mengurangi ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan penelitian terdahulu Khera *et al* (2021) dengan pendekatan indeks inklusi keuangan yang menggabungkan aspek tradisional dan digital. belum

banyak diterapkan dalam penelitian serupa di konteks Indonesia, sehingga memberikan kontribusi empiris dan metodologis yang baru. Dalam menghitung inklusi keuangan dimensi usage tradisional menggunakan proxy kartu debit, sedangkan pada penelitian ini menambahkan kartu kredit sebagai proxy, selain itu penelitian ini juga menambahkan proxy pengukuran pada usage digital yaitu menggunakan mesin EDC

Dengan latar belakang ini, penelitian ini memiliki beberapa kebaruan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya. Pertama, penelitian ini menguji hubungan non-linear antara pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB Perkapita dan ketimpangan pendapatan dengan pendekatan Kurva Kuznets terbalik secara spasial, yaitu membedakan wilayah perdesaan, perkotaan, dan gabungan. Kedua, indikator ketimpangan yang digunakan bukan hanya rasio Gini, melainkan berdasarkan rata-rata pengeluaran 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah, yang dinilai lebih representatif dalam menangkap kesejahteraan kelompok masyarakat miskin.

1.2 Rumusan Masalah

1. Sejauh mana pengaruh PDRB perkapita dan inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan wilayah perdesaan, perkotaan dan gabungan di Indonesia?
2. Apakah hipotesis teori *inverted U-shaped Kuznets Curve* relevan wilayah perdesaan, perkotaan dan gabungan di Indonesia?
3. Berapakah nilai *turning point* dari teori *inverted U-shaped Kuznets Curve* wilayah perdesaan, perkotaan dan gabungan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sejauh mana pengaruh PDRB perkapita dan inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan wilayah perdesaan, perkotaan dan gabungan di Indonesia.
2. Mengetahui relevansi dari hipotesis teori *inverted U-shaped Kuznets Curve* relevan wilayah perdesaan, perkotaan dan gabungan di Indonesia..
3. Mengetahui berapa nilai *turning point* dari teori *inverted U-shaped Kuznets Curve* wilayah perdesaan, perkotaan dan gabungan di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis dalam studi ini yaitu bisa menjadi referensi akademik terkait topik pendapatan perkapita, inklusi keuangan dan ketimpangan pendapatan, sehingga dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat secara praktis dalam studi ini yaitu menambah wawasan penelitian peneliti selanjutnya dan studi ini dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan terkait pendapatan perkapita, inklusi keuangan dan ketimpangan pendapatan.